



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **INDRIYA PURWANINGSIH**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **84744**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	4.405.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/200 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA GRESIK, Rp. 180.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1.776 m2/10 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 578 m2/10 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	28.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	648.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.436.348.000



III. HUTANG

Rp. 700.024.703

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.736.323.297

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.